

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

1

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

2

Jabatan

:

3

Bertindak untuk dan atas nama

:

4

Alamat

:

5

Telepon/Fax.

:

6

E-mail

:

7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

8

sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;

2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;

3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;

4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

20....9

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Meterai

Tanggal
Cap

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Keterangan:

- 1. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 2. diisi nama lengkap.
- 3. diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja.
- 4. diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 5. diisi alamat SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 6. diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 7. diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 8. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- 9. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

BUPATI MALANG,
Ttd,

SUJUD PRIBADI

D:\PERBUB PAK GHOTI\2008\BLUD\Lamp. Pedoman Teknis BLUD.doc

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

1

PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

2

Jabatan

:

3

Bertindak untuk dan
atas nama

:

4

Alamat

:

5

Telepon/Fax.

:

6

E-mail

:

7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Malang Nomor.....Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,.....⁸ bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Meterai

Tanggal

Cap

.....20....⁹

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

- Keterangan:**
- 1. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 2. diisi nama lengkap.
 - 3. diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja.
 - 4. diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 5. diisi alamat SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 6. diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 7. diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 8. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - 9. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH
UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	
..... 1	
Nomor : Lampiran : Nomor : Permohonan untuk Menerapkan PPK-BLUD	Kepada Yth. Bupati Malang di – M A L A N G
<p>Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Malang Nomor.....Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).</p> <p>Untuk mendukung permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malang dimaksud, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;2. Pola Tata Kelola;3. Rencana Strategis Bisnis;4. Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi Laporan Keuangan;²5. Standar Pelayanan Minimum;6. Laporan Audit/Surat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara Independen.³ <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.</p> <p>.....20....⁴</p>	
Mengetahui, Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....	Pemohon, Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.....

Keterangan:

1. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
2. pilih salah satu.
3. diisi salah satu Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
4. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.

BUPATI MALANG,
Ttd,

SUJUD PRIBADI